



Tanam Paksa di Jawa dan Upaya Memonopoli Perdagangan di Sumatera

Sistem Tanam Paksa tidak mengurangi kebijakan monopoli perdagangan. Tidak mengherankan, dalam kurun waktu yang sama dengan penerapan sistem Tanam Paksa di Jawa, Belanda gencar memaksimalkan peluang dari monopoli perdagangan di Pulau Sumatera, dengan produk-produk utama seperti Lada, kopi, koko, tembakau, dan teh. Dalam rangka mencapai tujuan itu, Belanda melakukan dua langkah utama.

Pertama, menguasai kerajaan-kerajaan di Sumatera yang selama ini independen serta menjadikannya kerajaan bawahan. Kerajaan-kerajaan itu di antaranya Kesultanan Aceh, Kerajaan Siak (meliputi Deli Serdang, Asahan, Langkat), dan Kerajaan Batak di Tapanuli. *Kedua*, menerapkan politik pecah-belah. Salah satu bentuknya adalah mendukung (dengan kekuatan bersenjata) salah satu pihak dalam suatu kerajaan, masyarakat, ataupun wilayah yang sedang terlibat pertikaian atau perpecahan. Dukungan itu biasanya bersyarat, di antaranya hak monopoli atas perdagangan produk utama di wilayah tersebut, bersedia tunduk terhadap kekuasaan Belanda, dan sebagainya.

Terkait dengan langkah pertama, Belanda terlibat perang dengan Kesultanan Aceh dari tahun 1873 sampai tahun 1904, yang dikenal dengan nama Perang Aceh. Sumber lain mengatakan perang ini sudah dimulai sejak sekitar tahun 1850. Selanjutnya, dari tahun 1870 sampai tahun 1907, Belanda terlibat perang dengan Kerajaan Batak. Perang Aceh dilatarbelakangi keinginan Belanda untuk menguasai sepenuhnya Pulau Sumatera ke dalam kekuasaannya, yang memungkinkannya memonopoli perdagangan di pulau tersebut. Sejak berdiri pada tahun 1507, Kesultanan Aceh berkembang menjadi sebuah kerajaan yang mandiri serta mengendalikan perdagangan rempah-rempah (lada), timah, beras, emas, perak, dan tekstil di Semenanjung Malaya. Perang Aceh semakin gencar lagi pada masa-masa awal penerapan kebijakan Pintu Terbuka (tahun 1870-an), di mana Belanda membutuhkan lahan-lahan perkebunan yang luas untuk dikelola oleh pihak-pihak swasta asing.

Terkait dengan langkah kedua, Belanda memihak Kerajaan Pagaruyung (Sumatera Barat) dalam konfliknya dengan kaum Padri (1815–1837). Dengan bantuan tersebut, Belanda berharap dapat memonopoli perdagangan kopi, yang menjadi produk andalan Tanah Minang pada masa itu.

Sistem TP juga menyita sejumlah besar tenaga kerja dari para petani untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi sistem TP, termasuk membangun jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi hasil bumi, pengembangan fasilitas pelabuhan, konstruksi perumahan untuk para pejabat, membangun pabrik dan gudang-gudang untuk hasil bumi, membangun bendungan dan irigasi, dan bahkan benteng pertahanan.

Eksplotasi dari sistem ini tidak ada pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penjajahan Belanda. Seorang pejabat senior mengatakan bahwa di bawah sistem TP, para petani dipaksa melakukan 4 atau 5 kali lebih banyak kerja daripada yang biasanya dituntut sebelum tahun 1830.

Kebanyakan petani harus bekerja selama lebih dari 150 hari dalam setahun untuk *cultuurstelsel*. Pembayaran yang diterima oleh petani sangat kecil dan mereka juga dibebani dengan pajak yang sangat tinggi. Kapitalisme di Belanda dan Eropa sungguh bangkit dari keringat dan darah jutaan petani di Hindia Timur.

Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa sistem TP merupakan kebijakan paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia-Belanda. Bahkan jauh lebih kejam daripada sistem monopoli VOC. Pada zaman VOC para petani hanya